

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN BIMA

2018 - 2022



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN BIMA

2018 - 2022



KATALOG DALAM PENERBITAN

Catalogue in Publication

Judul/ : **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut
Pengeluaran Kabupaten Bima 2018-2022/** *Gross Regional
Title Domestics Product (GRDP) by Expenditure of Bima Regency
2018-2022*

ISBN : **2527-7928**

No. Publikasi/ : **52060.2304**

Publication Number

Ukuran Buku/ : **21 cm x 29 cm**

Book Size

Jumlah Halaman/ : **XXii + 61**

Total Pages

Naskah/ : **Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik/**

Manuscript Section of Regional Account Statistics and Statistics Analysis

Diterbitkan Oleh/ : **Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima/**

Published By BPS – Statistics of Bima Regency

Dicetak Oleh/ : **CV. MAHARANI**

Printed By

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan
sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat
Statistik.**

*Prohibited announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of the contents of this book for
commercial purposes without the written permission of the Central Bureau of Statistics.*

TIM PENYUSUN

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2018-2022

*Gross Regional Domestic Product (GRDP) by Expenditure of Bima Regency
2018-2022*

PENGARAH

Ir. Muhadi

PENANGGUNG JAWAB

Setiawan Kusmayudi, SE

EDITOR

Alam Syahputra Widodo, S. Tr. Stat.

PENULIS DAN PENGOLAH DATA

M. Ilhamuddin, S.ST

GAMBAR KULIT

Alam Syahputra Widodo, S. Tr. Stat.

KATA PENGANTAR



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekonomi ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan perhitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bima, 28 April 2023
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BIMA
Kepala,

Ir. Muhadi
NIP. 19661231 199401 1 001

<https://bimakab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	6
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)...	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	15
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori (PI)	22
2.6 Ekspor dan Impor	25
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BIMA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2018-2022.....	27
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	29
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	34
3.2.1 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	34
3.2.2 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	36
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	36
3.2.4 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	39
3.2.5 Perkembangan Perubahan Inventori	39
3.2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa	41

BAB IV	PERKEMBANGAN	AGREGAT	PRDB	MENURUT	
	PENGELUARAN	KABUPATEN	BIMA	TAHUN 2018-2022	43
4.1	PDRB (Nominal)			45
4.2	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB			46
4.3	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)			46
	PENUTUP			49
	LAMPIRAN			53
	DAFTAR PUSAKA			59

<https://bimakab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2018-2022	29
Tabel 2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2018-2022	30
Tabel 3	Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2018-2022	31
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2018-2022	32
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2018-2022	33
Tabel 6	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2018-2022	33
Tabel 7	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bima Tahun 2018-2022	35
Tabel 8	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Bima, 2018-2022	37
Tabel 9	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bima 2018-2022	38
Tabel 10	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bima 2018-2022	39
Tabel 11	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bima 2018-2022	40
Tabel 12	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Bima 2018-2022	41
Tabel 13	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bima, 2018-2022	45
Tabel 14	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bima, Tahun 2018-2022	46
Tabel 15	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Bima, Tahun 2018-2022	47

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2018-2022.....	30
Grafik 2	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2018-2022.....	32

<https://bimakab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2017-2021 (Miliar Rupiah)	55
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2017-2021 (Miliar Rupiah)	55
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2017-2021 (persen)	56
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2017-2021 (persen)	56
Lampiran 5	Indeks harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2017-2021	57
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (persen), Kabupaten Bima 2018-2022	57

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>



BAB I
PENDAHULUAN

<https://bimakab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, disamping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²*Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat didalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan diatas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antarwilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama dibidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>



BAB II

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://bimakab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Pereengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan dibawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS

- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan dibidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan dibidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang takterpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nigari yang ada di wilayah kabupaten/kota;b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-Pkabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi P K-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output - Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan *men-deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v **Metoda estimasi**

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data dimasing-masing daerah.

- Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor)= Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/ BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ;dan data ternak, Ditjennak Kementan.

V Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = $\frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku}}{\text{IHPB (t)}}$ - $\frac{\text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku}}{\text{IHPB (t-1)}}$

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan dibidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/import barang dari/ke Luar Negeri/provinsi/kabupaten/kota ke/dari kabupaten/kota tersebut
- b. Ekspor/import jasa dari/ke Luar Negeri/provinsi/kabupaten/kota ke/dari kabupaten/kota tersebut

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut

lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://bimakab.bps.go.id>



BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN
BIMA MENURUT PDRB PENGELUARAN
2018-2022

<https://bimakab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Bima cenderung fluktuatif selama periode 2018-2022. Hal ini terlihat dari PDRB yang mengalami peningkatan dan kontraksi sepanjang periode tersebut baik Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Kondisi perekonomian Kabupaten Bima ini tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik, keadaan perekonomian Kabupaten Bima ikut memberikan sinyal positif. Pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Bima (adh Berlaku) tercatat sebesar 11.857,28 milyar. Pada periode tahun 2018-2022 PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami peningkatan, kecuali tahun 2020 yang mengalami kontraksi atau penurunan. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bima pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel 1 dibawah:

**Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima
2018 - 2022**

Kategori	(Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021'	2022''
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.593,48	8.014,82	7.798,94	8.100,18	8.728,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	169,10	179,44	177,91	182,81	201,40
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.137,93	2.197,48	2.247,21	2.300,11	2.393,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.303,20	4.669,42	4.495,91	4.666,36	4.753,74
5. Perubahan Inventori	46,47	47,85	48,72	25,89	28,17
6. Net Ekspor	(3.418,10)	(3.478,10)	(3.362,28)	(3.418,10)	(3.370,59)
PDRBe	10.832	11.631	11.406	11.857	12.735

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bima pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel 2.

**Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima
2018 - 2022**

(Milyar Rupiah)

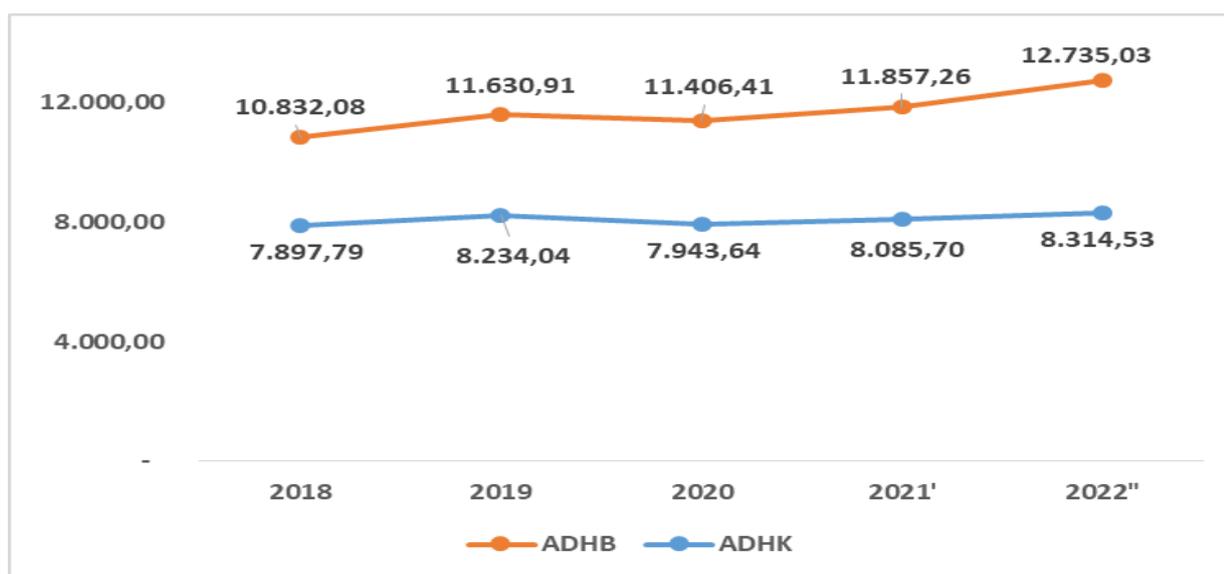
Kategori	2018	2019	2020	2021'	2022''
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.381,98	5.537,92	5.339,51	5.448,22	5.670,03
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	119,04	123,14	121,13	122,08	128,28
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.279,23	1.302,15	1.314,97	1.322,94	1.343,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.747,42	2.910,12	2.771,54	2.807,09	2.729,23
5. Perubahan Inventori	23,27	23,44	23,32	12,08	12,85
6. Net Ekspor	(1.653,16)	(1.662,72)	(1.626,84)	(1.626,73)	(1.569,55)
PDRBe	7.898	8.234	7.944	8.086	8.315

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dari tabel 2, pada periode 2018-2022 terlihat bahwa sebagian besar komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bima menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2020 beberapa komponen pengeluaran menurun akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 nilai PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari 8.085,70 miliar pada tahun 2021 menjadi 8.314,53 miliar pada tahun 2022.

Grafik 1. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2018-2022



Dari grafik 1, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluaran, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor neto (E) atau nilai ekspor setelah dikurangi nilai impor

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2018 - 2022

Kategori	(Persen)				
	2018	2019	2020	2021'	2022''
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70,10	68,91	68,37	68,31	68,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,56	1,54	1,56	1,54	1,58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19,74	18,89	19,70	19,40	18,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	39,73	40,15	39,42	39,35	37,33
5. Perubahan Inventori	0,43	0,41	0,43	0,22	0,22
6. Net Ekspor	(31,56)	(29,90)	(29,48)	(28,83)	(26,47)
PDRBe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Bima, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (diatas 68 persen). Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar yakni sekitar 37 - 40 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 18 - 19 persen yang artinya peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Net ekspor juga memiliki peran yang relatif yaitu sekitar 26-31 persen, akan tetapi net ekspor disini menunjukkan angka negatif yang mengindikasikan bahwa kegiatan impor masih lebih besar dari kegiatan ekspor, sebagian kebutuhan domestik masih lebih banyak dipenuhi oleh produk impor.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2018-2022 perekonomian Kabupaten Bima mengalami pertumbuhan positif dan negatif, yakni sebesar 4,04 persen (2018); 4,26 persen (2019). Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Bima mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi sebesar 3,53 persen sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Bima kembali pada pertumbuhan positif sebesar 1,79 persen dan pada tahun 2022 Perekonomian Kabupaten Bima terus naik sebesar 2,83 persen. Sedangkan dari grafik 2 akan terlihat tren laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran selama periode tahun yang sama.

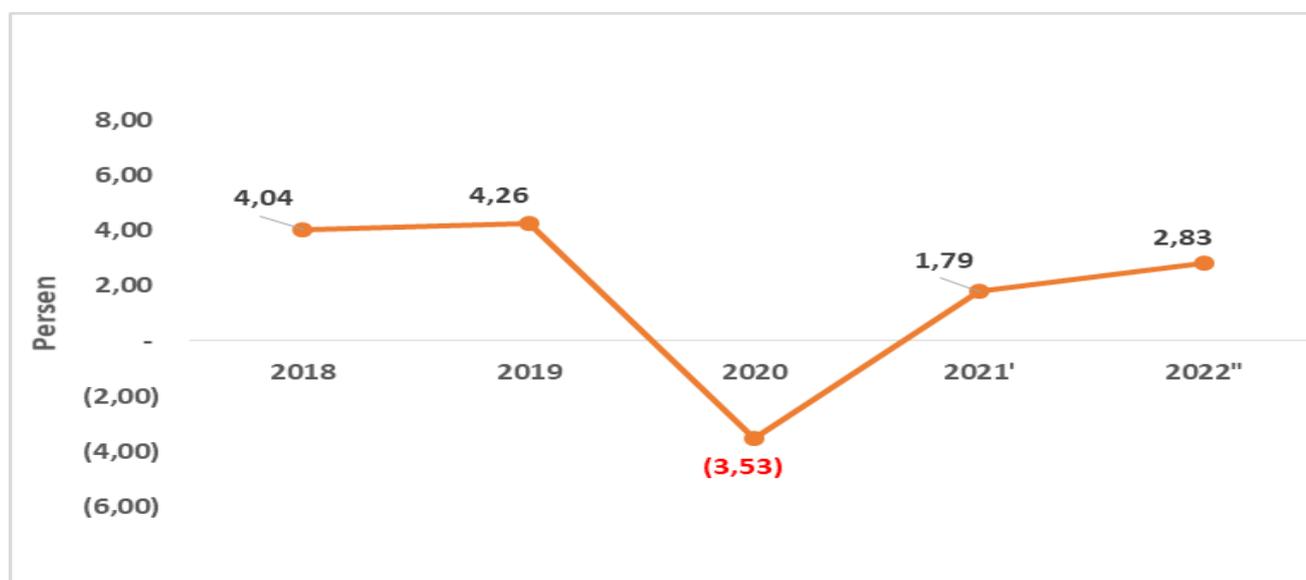
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima, 2018 - 2022

Kategori	(Persen)				
	2018	2019	2020	2021'	2022''
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,11	2,90	(3,58)	2,04	4,07
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,04	3,44	(1,63)	0,79	5,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,26	1,79	0,98	0,61	1,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,88	5,92	(4,76)	1,28	(2,77)
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRBe	4,04	4,26	(3,53)	1,79	2,83

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Grafik 2. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima, 2018-2022



Indeks harga implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor.

Tabel 5. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2018 – 2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022"
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	141,09	144,73	146,06	148,68	153,94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	142,06	145,72	146,87	149,74	157,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	167,13	168,76	170,89	173,86	178,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	156,63	160,45	162,22	166,23	174,18
5. Perubahan Inventori	199,71	204,15	208,95	214,26	219,25
6. Net Ekspor	206,76	209,18	206,68	210,12	214,75
PDRBe	137,15	141,25	143,59	146,64	153,17

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama periode 2018-2022 konsumsi rumah tangga masih mendominasi dan menjadi komponen terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima. Pada tahun 2022, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi positif sebesar 1,94 persen. Sementara komponen Pembentukan modal tetap bruto berkontribusi sebesar 1,06 persen seperti terlihat pada tabel 6.

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2018 – 2022

Kategori	(Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022"
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,83	2,93	(2,41)	1,22	1,94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,06	0,07	(0,06)	0,03	0,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,80	0,80	(0,69)	0,35	0,53
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,61	1,71	(1,39)	0,70	1,06
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRBe	4,04	4,26	(3,53)	1,79	2,83

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

⁶ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Bima untuk periode 2018 - 2022.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Bima ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk domestik yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bima maupun produk impor yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018 - 2022 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga cenderung mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Hanya pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga turun akibat pandemi.

Selama periode 2018 - 2022 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung menurun. Walaupun proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB semakin berkurang tetapi dilihat dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan tahun 2010) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor kenaikan

jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bima 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga	7.593,48	8.014,82	7.798,94	8.100,18	8.728,54
a. ADHB (Miliar Rp)					
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.381,98	5.537,92	5.339,51	5.448,22	5.670,03
Proporsi terhadap PDRB	70,10	68,91	68,37	68,31	68,54
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun					
a. ADHB	22.384,91	23.429,67	22.186,93	22.782,97	24.121,57
b. ADHK 2010	16.321,08	16.586,91	15.451,40	15.536,16	15.748,65
Pertumbuhan ⁷ (persen)					
a. Total Konsumsi RT	2,11	2,90	(3,58)	2,04	4,07
b. Perkapita	2,98	1,62	(6,84)	0,55	1,37
Jumlah penduduk (org)	483.901	496.418	512.847	520.444	527.952

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata selama tahun 2018-2022, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2018, setiap rumah tangga di Kabupaten Bima menghabiskan dana sekitar 22.384,91 ribu Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut terus meningkat hingga pada nilai konsumsi per rumah tangga 24.121,57 ribu Rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, atas dasar harga konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,90 persen. Sedangkan tahun 2020 konsumsi rumah tangga baik per rumah tangga dan per-kapita mengalami kontraksi sebesar 3,58 persen dan 6,84 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Bima menurun, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai.

Konsumsi perkapita tahun 2022 sebesar 15.748,65 ribu rupiah setahun dimana kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 15.451,40 ribu rupiah. Hal ini menjadi indikasi bahwa

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

terjadi perbaikan dalam pengeluaran konsumsi masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Bima, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	169,10	179,44	177,91	182,81	201,40
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	119,04	123,14	121,13	122,08	128,28
Proporsi terhadap PDRB (persen ADHB)	1,56	1,54	1,56	1,54	1,58
Laju pertumbuhan (persen)	7,04	3,44	(1,63)	0,79	5,07

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dari tabel 8 pada tahun 2022 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 201,40 miliar rupiah. Proporsi Konsumsi Akhir LNPRT berada pada kisaran 1,54-1,58 persen. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami fluktuatif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 7,04 persen.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu

adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif *ekuivalen* dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 1,79 persen. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan, dari 20,62 persen (2018) hingga mencapai 18,80 persen (2022). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 18,80 persen.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bima 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.137,93	2.197,48	2.247,21	2.300,11	2.393,77
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.279,23	1.302,15	1.314,97	1.322,94	1.343,69
Proporsi terhadap PDRB (Persen-ADHB)	20,62	19,74	19,70	19,40	18,80
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	4.418,12	4.426,68	4.381,83	4.419,52	4.534,06
b. ADHK 2010	2.643,59	2.623,09	2.564,06	2.541,95	2.545,11
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah (Ribu)					
a. ADHB	260.152	280.220	294.214	308.119	330.539
b. ADHK 2010	155.662	166.048	172.161	177.219	185.541
Pertumbuhan ⁸					
a. Total konsumsi pemerintah	1,26	1,79	0,98	0,61	1,57
b. Konsumsi perkapita	0,23	(0,78)	(2,25)	(0,86)	0,12
c. Konsumsi per-pegawai	1,26	6,67	3,68	2,94	4,70
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁹	8.218	7.842	7.638	7.465	7.242
Jumlah penduduk (org)	483.901	496.418	512.847	520.444	527.952

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 4.418,12 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga sebesar 4.534,06 ribu rupiah pada tahun 2022 (tabel 9)

Konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Berkurangnya jumlah pegawai pemerintah pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2022 dan meningkatnya jumlah konsumsi pemerintah dari tahun ke tahun menjadi salah satu alasan. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2022, sebesar 4,70 persen.

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

⁹ Tidak termasuk TNI dan Polri

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹⁰. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi dimana pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,92 persen dan mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan tahun 2022 sebesar 4,76 persen dan 2,77 persen.

PMTB memiliki peranan penting dalam penyusunan PDRB dimana PMTB memiliki kontribusi sekitar 37-40 persen (tabel 10). Proporsi tersebut cenderung stabil selama periode 2018-2022.

Tabel 10. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bima 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.303,20	4.669,42	4.495,91	4.666,36	4.753,74
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.747,42	2.910,12	2.771,54	2.807,09	2.729,23
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	39,73	40,15	39,42	39,35	37,33
Pertumbuhan Total PMTB	3,88	5,92	(4,76)	1,28	(2,77)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang,

¹⁰ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bima 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Perubahan Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	46,47	47,85	48,72	25,89	28,17
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	23,27	23,44	23,32	12,08	12,85
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	0,43	0,41	0,43	0,22	0,22

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Nilai Perubahan Inventori dari tahun 2018 sampai 2022 berfluktuasi dimana nilai terendah sebesar 25,89 miliar rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2020, Perubahan Inventori atas dasar harga berlaku sebesar 48,72 miliar rupiah, tertinggi dalam rentang 5 tahun kebelakang.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Bima secara keseluruhan tidak berubah signifikan. Pada tahun 2018, proporsi perubahan inventori adalah 0,43 persen, selanjutnya 0,41 persen dan 0,43 persen (2019 dan 2020). Pada tahun 2021 proporsi perubahan inventori terhadap PDRB di Kabupaten Bima berkurang menjadi 0,22 persen. Dan kemudian pada tahun 2022 tetap sebesar 0,22 persen. Proporsi perubahan inventori terendah terdapat pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 0,22 persen.

3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Tabel 12. Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Bima 2018-2022

U r a i a n	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	(3.418)	(3.478)	(3.362)	(3.418)	(3.370)
b. ADHK (Miliar Rp)	(1.653)	(1.662)	(1.626)	(1.626)	(1.569)
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	(31,56)	(29,90)	(29,48)	(28,83)	(26,47)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pada Tabel 12 terlihat bahwa dalam kurun waktu antara Tahun 2018 hingga Tahun 2022, Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bima bernilai negatif baik dilihat atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Hal ini berarti bahwa selama 5 Tahun terakhir neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Bima dalam posisi defisit. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nilai neraca perdagangan yang berada pada posisi defisit ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Bima, masih banyak kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan pendukung yang berasal dari impor daerah lain.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN

KABUPATEN BIMA
TAHUN 2018 - 2022

<https://bimakab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, ditengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Bima, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 13. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bima, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	10.832,08	11.630,91	11.406,41	11.857,26	12.735,03
- ADHK 2010	7.897,79	8.234,04	7.943,64	8.085,70	8.314,53
PDRB perkapita (Ribu)					
- ADHB	22.384,92	23.429,68	22.241,35	22.782,97	24.121,57
- ADHK 2010	16.321,08	16.586,92	15.489,29	15.536,15	15.748,65
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	2,98	1,63	(6,62)	0,30	1,37
Jumlah penduduk (org)	483.901	496.418	512.847	520.444	527.952
Pertumbuhan penduduk	1,03	2,59	3,31	1,48	1,44

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB per-kapita Kabupaten Bima pada periode 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 22.384,92 ribu rupiah pada tahun 2018 menjadi 24.121,57 ribu rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2022 besaran PDRB Perkapita dapat tumbuh positif sebesar 1,37 persen dimana sebelumnya tahun 2020 mengalami kontraksi yang dalam sebesar 6,62 persen. Hal ini sangat erat kaitannya dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bima tahun 2022 yang juga mengalami peningkatan.

4.2 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Seluruh barang dan jasa yang berada di wilayah Bima digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir bahkan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir sehingga harus mengimpor dari luar daerah dan luar negeri. Meskipun konsumsi akhir meningkat setiap tahun, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Artinya, laju pertumbuhan PDRB secara keseluruhan cenderung lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir.

Tabel 14. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bima, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)(Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	7.593,48	8.014,82	7.798,94	8.100,18	8.728,54
b. LNPRT	169,10	179,44	177,91	182,81	201,40
c. Pemerintah	2.137,93	2.205,40	2.247,21	2.300,11	2.393,77
Jumlah	9.900,51	10.391,74	10.224,06	10.583,11	11.323,71
PDRB (ADHB)(Miliar Rp)	10.832,08	11.630,91	11.406,41	11.857,26	12.735,03
Proporsi	91,40	89,35	89,63	89,25	88,92

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output

adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 15. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Bima, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010)	7.897,79	8.234,04	7.943,64	8.085,70	8.314,53
(Miliar Rp)					
Perubahan	306,88	336,26	(290,41)	142,06	228,83
(Miliar Rp)					
PMTB (ADHK 2010)	2.747,42	2.910,12	2.771,54	2.807,09	2.729,23
(Miliar Rp)					
ICOR	8,95	8,65	(9,54)	19,76	11,93

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR pada tahun 2018 sebesar 8,95. Pada tahun 2019 naik menjadi 8,65. Kemudian pada tahun 2020, nilai ICOR Kabupaten Bima sebesar minus 9,54 karena penurunan output dari 8.234,04 miliar rupiah tahun 2019 menjadi 7.943,64 miliar rupiah tahun 2020 akibat pandemi covid-19. Nilai ICOR Kabupaten Bima periode tahun 2021 meningkat menjadi 19,76 yang memberi sinyal positif mengenai pemulihan ekonomi. Kemudian pada tahun 2022, nilai ICOR Kabupaten Bima menjadi 11,93.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>

BAB V
PENUTUP

<https://bimakab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018-2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Bima pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018-2022, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bima terhadap ekonomi daerah atau negara lain.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://bimakab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), Kabupaten Bima 2018-2022

(Juta Rupiah)

Kategori	2018	2019	2020	2021'	2022''
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.593.479,50	8.014.822,11	7.798.944,91	8.100.183,60	8.728.535,88
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	169.100,99	179.435,53	177.905,17	182.811,77	201.402,75
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.137.930,54	2.197.484,80	2.247.208,68	2.300.114,05	2.393.768,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.303.200,01	4.669.419,01	4.495.910,85	4.666.360,88	4.753.742,11
5. Perubahan Inventori	46.474,78	47.851,46	48.721,30	25.890,74	28.166,95
6. Net Ekspor	(3.418.102,76)	(3.478.099,42)	(3.362.280,33)	(3.418.099,91)	(3.370.585,78)
PDRBe	10.832.083	11.630.913	11.406.411	11.857.261	12.735.030

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah), Kabupaten Bima 2018 - 2022

(Juta Rupiah)

Kategori	2018	2019	2020	2021'	2022''
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.593.479,50	8.014.822,11	7.798.944,91	8.100.183,60	8.728.535,88
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	169.100,99	179.435,53	177.905,17	182.811,77	201.402,75
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.137.930,54	2.197.484,80	2.247.208,68	2.300.114,05	2.393.768,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.303.200,01	4.669.419,01	4.495.910,85	4.666.360,88	4.753.742,11
5. Perubahan Inventori	46.474,78	47.851,46	48.721,30	25.890,74	28.166,95
6. Net Ekspor	(3.418.102,76)	(3.478.099,42)	(3.362.280,33)	(3.418.099,91)	(3.370.585,78)
PDRBe	10.832.083	11.630.913	11.406.411	11.857.261	12.735.030

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2018-2022 (persen)

(Persen)

Kategori	2018	2019	2020	2021'	2022''
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	(99,90)	2,90	(3,58)	2,04	4,07
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(99,89)	3,44	(1,63)	0,79	5,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(99,90)	1,79	0,98	0,61	1,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	(99,90)	5,92	(4,76)	1,28	(2,77)
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRBe	(99,90)	4,26	(3,53)	1,79	2,83

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2018-2022 (persen)

(Persen)

Kategori	2018	2019	2020	2021'	2022''
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70,10	68,91	68,37	68,31	68,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,56	1,54	1,56	1,54	1,58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19,74	18,89	19,70	19,40	18,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	39,73	40,15	39,42	39,35	37,33
5. Perubahan Inventori	0,43	0,41	0,43	0,22	0,22
6. Net Ekspor	(31,56)	(29,90)	(29,48)	(28,83)	(26,47)
PDRBe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2018-2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022"
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	141,09	144,73	146,06	148,68	153,94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	142,06	145,72	146,87	149,74	157,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	167,13	168,76	170,89	173,86	178,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	156,63	160,45	162,22	166,23	174,18
5. Perubahan Inventori	199,71	204,15	208,95	214,26	219,25
6. Net Ekspor	206,76	209,18	206,68	210,12	214,75
PDRBe	137,15	141,25	143,59	146,64	153,17

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2018-2022 (persen)

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022"
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,06	2,58	0,92	1,79	3,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,57	2,58	0,79	1,96	4,85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,10	0,98	1,27	1,74	2,46
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,69	2,44	1,10	2,48	4,78
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRBe	3,79	2,99	1,66	2,13	4,45

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

<https://bimakab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

<https://bimakab.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bima**

**Jl. Soekarno - Hatta, Woha - Bima
NTB 84171 Telp/Fax (0374) 646003
Email : bps5206@bps.go.id
Homepage : <http://bimakab.bps.go.id>**